

---

# PERKEMBANGAN KERJA SAMA DAN LEMBAGA INTERNASIONAL

Dinamika perekonomian yang diwarnai divergensi arah pertumbuhan ekonomi, dan disertai beberapa risiko yang membayangi prospek pertumbuhan, dipantau secara cermat dan menjadi topik pembahasan dalam berbagai fora kerja sama internasional pada TW3-18. Forum kerja sama internasional terus berkomitmen melakukan upaya untuk mendorong pemulihan ekonomi, mengatasi risiko, dan meningkatkan resiliensi melalui inisiatif kerja sama dan pembahasan. Perhatian khusus juga diberikan pada beberapa isu strategis terkait perkembangan teknologi digital.

Fora kerja sama *International Monetary Fund* (IMF), G20, dan *Bank for International Settlement* (BIS) menekankan pembahasan pada isu perkembangan perekonomian dunia dan memitigasi risikonya. Bank Indonesia menekankan pentingnya bauran kebijakan moneter, fiskal, dan struktural (*three-pronged approach*) untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Isu-isu terkait *future of work*, pembiayaan infrastruktur, dan reformasi keuangan menjadi bagian dari serangkaian isu yang menjadi topik pembahasan fora multilateral pada TW3-18.

Dalam tataran kerja sama regional, Forum ASEAN melanjutkan proses integrasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang diimbangi dengan upaya mendorong stabilitas dan inklusivitas di kawasan. Forum ASEAN+3 melanjutkan upaya peningkatan resiliensi kawasan melalui penguatan *Chiang Mai Initiatives Multilateralization* (CMIM) dan peningkatan peran ASEAN+3 *Macroeconomic Research Office* (AMRO).

Perkembangan *Financial Technology* (*fintech*) juga menjadi perhatian fora kerja sama. Peranan *fintech* yang pesat disadari memberikan peluang sekaligus tantangan yang perlu

dimitigasi agar tetap memberikan manfaat bagi perekonomian. Isu *fintech* dibahas secara komprehensif pada fora kerja sama IMF, World Bank, dan EMEAP. Selain itu, isu ancaman siber juga menjadi topik yang dibahas pada fora EMEAP.

### A. Pandangan terhadap Perkembangan Ekonomi Global

**IMF menyoroti pertumbuhan ekonomi global yang terus berlanjut, namun tidak merata.** IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global 2018 sebesar 3,7% di 2018 dan 2019, lebih rendah dari perkiraan pada Juli 2018 sebesar 3.9%. Ekspansi perekonomian global tersebut terutama ditopang oleh kondisi perekonomian AS yang tumbuh cukup tinggi sejalan dengan kebijakan stimulus fiskal pro-siklikal oleh Pemerintah AS.

**Outlook perekonomian global ke depan dibayangi oleh faktor risiko yang meningkat dalam jangka pendek.** Risiko tersebut antara lain peningkatan ketegangan perdagangan antara AS dengan negara mitra dagang, normalisasi kebijakan moneter di negara-negara maju, dan kerentanan di sektor keuangan. Selain ketidakseimbangan global (*global imbalances*) yang memerlukan respons kebijakan komprehensif, negara *emerging* juga dihadapkan pada volatilitas aliran modal sebagai dampak dari ketidakpastian pasar keuangan global yang tinggi.

**IMF dan G20 memandang negara anggota perlu mengantisipasi faktor risiko perekonomian global.** Negara G20 menekankan pentingnya kebijakan untuk memastikan fundamental perekonomian

domestik yang kuat seiring dengan peningkatan kerentanan sektor keuangan dan volatilitas arus modal. Terkait normalisasi kebijakan moneter negara maju, negara G20 menyepakati bahwa komunikasi yang lebih jelas sangat penting untuk menghindari *spillovers* yang berlebihan. Selain itu, negara G20 juga menyoroti kebijakan proteksionisme yang berpotensi memengaruhi *business confidence* sehingga berdampak negatif bagi perekonomian global, serta urgensi mencari solusi permasalahan perdagangan internasional secara multilateral. Terakhir, negara G20 menyambut baik upaya IMF untuk melakukan asesmen yang *rigorous, evenhanded, candid*, dan transparan, serta menyambut baik saran IMF untuk (i) memperkuat perekonomian (*rebuild buffer*); (ii) melanjutkan agenda reformasi sektor keuangan; (iii) menangani *capital flows* yang berlebihan dan *volatile*; (iv) memperkuat *Global Financial Safety Net* (GFSN) yang berbasis kuota dan sumber daya yang kuat, dengan IMF sebagai pusatnya; dan (v) memperkuat kerja sama dengan *Regional Financing Arrangements* (RFAs).

**BI aktif menyuarakan urgensi koordinasi memperkuat kebijakan global untuk mengatasi risiko perekonomian global.** Pada pertemuan Tahunan IMF-World Bank 2018 dan G20, BI menyampaikan bahwa upaya memperkuat *policy mix* (moneter, fiskal

dan struktural) dan memperkuat koordinasi kebijakan internasional untuk menghadapi ketidakpastian dan tantangan global sangat penting. Pada area kebijakan moneter, BI menekankan keutamaan proses perumusan kebijakan yang bersifat *pre-emptive*, *front loading*, dan *ahead of the curve* untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Selain itu, BI juga menekankan bahwa diperlukan komunikasi yang lebih baik dari negara maju terkait normalisasi kebijakan moneter yang diterapkan, serta upaya untuk memodernisasi *rules based multilateral trading system*. Terkait dengan ketegangan perdagangan yang semakin meningkat, BI memandang bahwa asesmen IMF mengenai konsekuensi makro atas tarif dan potensi manfaat liberalisasi bagi perekonomian merupakan prioritas utama. Lebih lanjut, BI mendorong negara-negara yang terlibat konflik untuk berdialog dan mengedepankan perdagangan barang dan jasa secara *free, fair, and mutually beneficial* sehingga menghasilkan dampak positif bagi perekonomian global (baik negara maju maupun negara *emerging*).

**Pembahasan pertumbuhan ekonomi global pada *Bank for International Settlement (BIS)* mengangkat topik terkait perkembangan aliran modal (*capital flow*), perubahan investor global, dan dampak terhadap perekonomian EMEs.** Beberapa risiko global yang dibahas, antara lain (i) normalisasi kebijakan moneter negara maju (AS, negara-negara Eropa, Jepang); (ii) dampak dari konflik perdagangan

yang diperkirakan akan semakin melemahkan ekonomi pada 2019; dan (iii) kebijakan fiskal yang pro-siklikal, khususnya di AS (di tengah hampir tercapainya *output* potensial). BIS memandang, seluruh faktor tersebut menimbulkan tekanan di pasar keuangan, termasuk ke EMEs, sehingga berdampak pada penurunan level cadangan devisa sejumlah EMEs.

**Para Gubernur BIS menyampaikan beberapa rekomendasi sebagai respons kebijakan atas dinamika pertumbuhan ekonomi global.** Para Gubernur mengidentifikasi sejumlah respons kebijakan, yaitu (i) menjaga disiplin kebijakan sehingga dapat menjadi acuan (*anchor*) dari ekspektasi pelaku ekonomi; (ii) melakukan pendalaman pasar keuangan, termasuk peningkatan praktik *hedging*; (iii) implementasi kebijakan intervensi yang dilakukan secara selektif untuk kondisi tertentu dan bertujuan untuk menjaga stabilitas nilai tukar agar sesuai dengan fundamental ekonomi; (iv) koordinasi kebijakan khususnya di domestik sehingga mempunyai tujuan yang sama; (v) membangun *policy buffer*, baik dari sisi kondisi fundamental ekonomi (pertumbuhan ekonomi, neraca transaksi berjalan, inflasi yang rendah dan stabil, serta sustainabilitas fiskal) maupun ketersediaan cadangan devisa; serta (vi) pemahaman yang lebih baik tentang profil investor asing pada obligasi pemerintah.

**Fora kerja sama regional juga melakukan pertemuan untuk membahas perkembangan ekonomi dan keuangan, serta berkoordinasi untuk memitigasi**

**risiko *spillovers*.** Pembahasan tersebut dilakukan untuk menyikapi kondisi perekonomian global yang masih penuh ketidakpastian dan kemungkinan *spillovers* terhadap kawasan. Forum kerja sama bank sentral di kawasan Asia Pasifik (EMEAP) melakukan pertemuan tingkat Gubernur guna membahas beberapa isu strategis, antara lain (i) perkembangan globalisasi dan implikasinya terhadap kebijakan moneter pada bank sentral EMEAP; (ii) evaluasi satu dekade *Global Financial Crisis* (GFC) dan pelajaran yang diambil bagi masa depan kawasan; serta (iii) identifikasi peluang dan tantangan perkembangan industri *fintech* bagi sistem keuangan kawasan.

**Pembahasan mengenai interdependensi perekonomian dunia dan dampak krisis terhadap lanskap perekonomian global juga menjadi topik utama.** Pada agenda pembahasan mengenai globalisasi dan implikasi kebijakan moneter pada bank sentral EMEAP, Gubernur Bank Sentral mendiskusikan bagaimana perekonomian dunia yang semakin interdependen telah memengaruhi kebijakan moneter secara signifikan. Berkaitan dengan hal tersebut, anggota EMEAP sepakat untuk mewaspadaikan reaksi pasar keuangan yang berlebihan terhadap kebijakan moneter dan fiskal di Amerika Serikat (AS), khususnya dampak dari pengetatan kebijakan moneter AS terhadap likuiditas USD di *emerging market*. Selain itu, para Gubernur Bank Sentral juga melakukan evaluasi sepuluh tahun peristiwa GFC. Secara khusus, para Gubernur

mendiskusikan bagaimana kebijakan yang ditempuh selama periode pemulihan dari krisis telah memengaruhi lanskap ekonomi dan pasar keuangan serta berdampak pada stabilitas moneter dan sistem keuangan. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Bank Indonesia menekankan langkah yang dapat ditempuh dalam menghadapi ketidakpastian global pasca GFC, yaitu dengan melakukan bauran kebijakan moneter dan makroprudensial, serta secara rutin dan efektif melakukan koordinasi dan komunikasi kebijakan, termasuk penguatan kerja sama di antara anggota EMEAP.

**Di tengah kondisi perekonomian global yang penuh dengan ketidakpastian, ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) dan Asian Development Bank (ADB) melakukan kajian yang mencermati perkembangan ekonomi kawasan dan tantangan yang akan dihadapi<sup>1</sup>.** AMRO menyoroti beberapa *downside risk* yang perlu diwaspadai, yaitu (i) ketidakpastian pergerakan suku bunga jangka-panjang AS selama periode normalisasi yang mempersulit pengambilan kebijakan di *emerging market*; (ii) penyesuaian struktur *yield* di AS; dan (iii) potensi risiko *deleveraging* di Tiongkok. Selanjutnya, ADB mengutarakan kajian tentang "*Cross-currents Test Asia's Resilience*" yang memperkirakan pertumbuhan Asia tetap solid pada 2018

1 Kajian tersebut dipaparkan dalam pertemuan ASEAN Senior Level Committee (SLC) pada 17-18 Oktober 2018 di Kota Kinabalu, Malaysia. ASEAN SLC beranggotakan Deputi Gubernur dan Pejabat Senior Bank Sentral serta *Co-chairs* dari tiap ASEAN Working Committee di jalur keuangan dan bank sentral.

sebesar 6% dan berlanjut ke 5,8% pada 2019. Inflasi Asia tetap terkendali, di tengah harga bahan bakar dan pangan yang diperkirakan meningkat. ADB juga menekankan bahwa kerja sama dan koordinasi kebijakan antarnegara di kawasan sangat penting, termasuk peningkatan kekuatan posisi fiskal dan keuangan di setiap negara untuk meningkatkan ketahanan kawasan.

### **B. Kerja Sama Memperkuat Sistem Keuangan Global dan Peningkatan Resiliensi Kawasan**

**G20 sepakat untuk melanjutkan komitmen reformasi arsitektur keuangan internasional guna memperkuat sistem keuangan agar lebih efektif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan global.** Fokus pembahasan reformasi arsitektur keuangan internasional meliputi topik (i) *Global Financial Safety Net* (GFSN); (ii) *capital flows*; (iii) *Eminent Person Group* (EPG); dan (iv) *debt sustainability*.

**G20 menegaskan kembali dukungan peningkatan resiliensi melalui penguatan Jaring Pengaman Keuangan Global atau *Global Financial Safety Net* (GFSN).** Peningkatan resiliensi diwujudkan antara lain melalui penguatan GFSN dengan menempatkan IMF sebagai pusatnya. Negara G20 berkomitmen untuk mendukung penyelesaian 15<sup>th</sup> *General Review of Quotas* (GRQ) pada pertemuan musim semi (*Spring Meeting*) IMF 2019 atau paling lambat pertemuan tahunan (*Annual Meeting*) IMF

2019. Selain itu, G20 juga menekankan pentingnya penguatan koordinasi antara IMF dan *Regional Financing Arrangements* (RFAs) melalui peningkatan sinergi modalitas dan pertukaran informasi antara IMF dan RFAs dengan memperhatikan mandat masing-masing. Penguatan koordinasi tersebut diperlukan dalam rangka mempercepat dan meningkatkan efektivitas program bagi negara anggota yang membutuhkan. Pada pertemuan Gubernur Bank Sentral dan Menteri Keuangan negara G20 pada Oktober 2018 di Nusa Dua, Bali, negara G20 memandang bahwa *political guidance* diperlukan untuk membantu IMF *Executive Board* mencapai konsensus bersama.

**G20 melanjutkan pembahasan terkait risiko perekonomian global terhadap *capital flows* yang bersumber dari volatilitas aliran modal.** Pada pertemuan G20 *International Financial Architecture Working Group* (IFA WG) September 2018, IMF dan OECD memaparkan penggunaan kerangka IMF's *Institutional View* (IV) dan OECD *Code of Liberalisation of Capital Movement* (*the Code*) pada contoh kasus *capital flow management* (CFM) dan *macroprudential management* (MPM). Sebagian besar negara G20 beranggapan bahwa IMF IV dan OECD Code memiliki dua tujuan yang berbeda, sehingga dalam praktiknya terdapat perbedaan definisi CFM dan MPM. IMF IV didasarkan pada *macroeconomic framework*, sedangkan OECD Code didasarkan pada *legal framework*. Pada pertemuan tersebut, Indonesia

menyampaikan pentingnya asesmen risiko terkait *capital flows* yang seimbang antara *recipient and source countries*. Dalam hal ini, *recipient countries* perlu mendapatkan seluruh opsi kebijakan, termasuk penggunaan CFM dan MPM, untuk menghadapi volatilitas *capital flows* yang berlebih. Sedangkan di sisi lain, *source countries* juga perlu mempertimbangkan dampak kebijakannya (*spillovers*) terhadap perekonomian global.

**Negara G20 menyambut baik laporan Eminent Person Group (EPG) terkait Global Finance Governance.**

EPG dibentuk oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara G20 pada 21 April 2017. Pada Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara G20 Oktober 2018, EPG melaporkan hasil *review* atas *global financial architecture and governance*. Di dalam laporan tersebut, EPG merekomendasikan sejumlah reformasi untuk meningkatkan koherensi dan efektivitas sistem moneter dan keuangan internasional. Terkait *finance chapter*, EPG merekomendasikan reformasi untuk memperkuat resiliensi keuangan global yang mencakup tiga aspek yaitu (i) pemanfaatan *capital flows* melalui pengembangan kerangka kebijakan dan penguatan dukungan untuk pasar keuangan domestik yang lebih dalam; (ii) peningkatan kapasitas surveilans risiko sistem keuangan; serta (iii) penguatan GFSN, termasuk melalui penyediaan pembiayaan oleh IMF yang sesuai dengan kebutuhan negara anggotanya. Secara umum, negara G20 menyambut baik laporan EPG dan sepakat untuk melanjutkan

pembahasan rekomendasi EPG pada laporan tersebut pada Presidensi G20 Jepang 2019.

**Negara anggota G20 dan IMF terus mendukung upaya untuk meningkatkan *debt sustainability* dan transparansi pengelolaan utang di negara-negara *Low Income Countries* (LICs).** Pada pertemuan G20 *International Financial Architecture Working Group* (IFA WG) September 2018, pembahasan berfokus pada upaya meningkatkan *debt sustainability* dan transparansi pengelolaan utang di LICs, baik dari sisi debitur maupun kreditur. Sehubungan dengan implementasi G20 *Operational Guideline for Sustainable Financing* (OGSF) yang telah di-*endorse* oleh G20 FMCBG Maret 2017, terdapat rencana *self-assessment* melalui pengisian kuesioner dari setiap negara anggota yang bersifat *voluntary* untuk dikompilasi sebagai rujukan *best practice*. Selain itu, pada pertemuan tahunan IMF 2018, negara anggota meminta IMF untuk memperkuat dukungan bagi penguatan *fiscal framework*, *capacity building* terkait *debt management*, dan penerapan *debt sustainability framework* yang telah diperbaharui untuk LICs. Negara anggota IMF juga mendukung *multi-pronged approach* IMF dan World Bank agar debitur dan kreditur dapat memperbaiki pencatatan, pemantauan, dan pelaporan yang lebih transparan atas utang publik dan swasta, serta upaya untuk memperkuat koordinasi kreditur dalam hal restrukturisasi utang.

**Terkait *financial inclusion*, negara G20 sepakat atas reformasi *Global***

### **Partnership of Financial Inclusion (GPFI).**

Sesuai persetujuan G20 FMCBG pada pertemuan Maret 2018 di Buenos Aires, GPFI telah memulai rencana *streamlining* atas *work program*, struktur, *governance*, dan *membership*, dengan target penyelesaian pada 2020. Lebih lanjut, untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan reformasi di GPFI, negara G20 menyepakati penyusunan *roadmap* kerja dari GPFI. *Roadmap* tersebut dipresentasikan pada KTT G20 Desember 2018 di Buenos Aires, Argentina.

**Upaya penguatan resiliensi kawasan dalam menghadapi risiko ketidakpastian global yang terus berlanjut juga menjadi fokus perhatian fora ASEAN+3.** Pada pertemuan ASEAN+3, antara lain dibahas mengenai penguatan *Chiang Mai Initiatives Multilateralisation (CMIM)* dan peningkatan peran AMRO untuk menghadapi risiko ketidakpastian global. ASEAN+3 juga melakukan kajian terkait "*Local Currency Contribution to the CMIM*". Dari kajian tersebut diketahui bahwa jika terdapat permintaan yang cukup besar akan *local currency* di CMIM, maka *local currency* dapat digunakan pada fasilitas CMIM, sekaligus untuk mengurangi ketergantungan terhadap USD.

**Selain meningkatkan resiliensi melalui penguatan jaring pengaman keuangan, forum ASEAN secara khusus mencermati peningkatan resiliensi sistem keuangan terhadap *cyber-threat*.** Pada pertemuan ASEAN SLC pada TW3-18, Deputi Gubernur Bank Sentral ASEAN membahas

inisiasi pembentukan *Cybersecurity Resilience and Information Sharing Platform (CRISP)*. Pembahasan tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan pada pertemuan Gubernur Bank Sentral ASEAN pada 6 April 2018 yang mengamanatkan agar dilakukan eksplorasi wadah *information sharing* untuk isu-isu *cyber security* di kawasan. Forum CRISP tersebut akan memiliki dua elemen utama yakni *Digital and Technology Network (DTN)* dan program peningkatan kapasitas dari negara ASEAN tentang *cybersecurity*. Inisiasi CRISP tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti dalam pembahasan teknis di *Working Committee* terkait.

### **C. Kerja Sama Mendorong Pembiayaan Infrastruktur**

**G20 berkomitmen untuk terus mendorong pembiayaan infrastruktur dengan menyambut baik progres *Roadmap Infrastruktur sebagai Asset Class*.** Indonesia bersama dengan negara anggota G20 lainnya menyatakan dukungan pada upaya meningkatkan penyediaan pembiayaan infrastruktur, melalui implementasi *Roadmap to Infrastructure as an Asset Class*. Implementasi *Roadmap* tersebut diharapkan dapat menghasilkan proyek-proyek yang *bankable* sehingga dapat menjadi solusi untuk menutup kesenjangan pembiayaan infrastruktur. Dalam hal ini, G20 telah menyusun *G20 Principles for Project Preparation (G20 Principles)* yang bertujuan untuk mendorong pembiayaan

di sektor infrastruktur melalui penerapan prinsip-prinsip penyiapan proyek yang dapat dirujuk oleh negara-negara G20 dan investor seperti *project rationale*, *appraisal*, kelayakan komersial, *affordability*, dan *deliverability*. G20 Infrastructure Working Group (IWG) bersama Presidensi G20 Argentina masih terus melanjutkan pembahasan pada *workstream* lainnya seperti *risk mitigation and credit enhancements*, *data availability*, dan *contractual and financial standardisation* hingga akhir 2018.

#### D. Kerja Sama Memanfaatkan Perkembangan Teknologi

Negara G20 melanjutkan pembahasan *future of work* yang mencakup dampak inovasi teknologi terhadap ketenagakerjaan. Dalam topik *future of work*, pembahasan diarahkan pada dampak dari perkembangan teknologi yang berlangsung sedemikian cepat terhadap perekonomian global, dan berbagai potensi dampak yang mungkin ditimbulkan. Dalam hal ini, forum G20 telah menyepakati diperlukannya *G20 Menu of Policy Options for Future of Work* dalam menghadapi dampak dari perkembangan teknologi tersebut. Kebijakan yang dituangkan dalam *menu of policy options* diarahkan pada empat pilar utama, yaitu (i) memastikan manfaat dari teknologi bagi pertumbuhan dan produktivitas; (ii) mendukung masyarakat dalam periode transisi dan mengelola pemerataan perkembangan teknologi;

(iii) memastikan sistem perpajakan yang berkesinambungan; dan (iv) memastikan ketersediaan data untuk pengambilan keputusan.

**G20 menyampaikan kebijakan pembangunan *Science and Technology Parks (STPs)* dan pemberian insentif pajak sebagai *Menu of Policy Options for Future of Work*.** Kebijakan pembangunan *Science and Technology Parks (STPs)* bertujuan untuk menyediakan infrastruktur pendukung yang memadai, sementara kebijakan pemberian insentif pajak bertujuan untuk mendorong *Foreign Direct Investment (FDI)* di bidang teknologi informasi. Terkait opsi kebijakan G20 tersebut, Bank Indonesia berkontribusi dengan memberikan contoh kebijakan berupa implementasi *big data project* untuk meningkatkan efektivitas kebijakan, khususnya di area ekonomi digital.

**Pada pertemuan tahunan IMF/WBG 2018, IMF dan World Bank menerbitkan *Bali Fintech Agenda*.** *Bali Fintech Agenda* terdiri dari 12 elemen kerangka kebijakan pengembangan *fintech* yang disusun oleh IMF dan World Bank dalam rangka menyikapi perkembangan *fintech* yang sangat pesat. Penyusunan *Bali Fintech Agenda* tersebut didasarkan oleh kebutuhan otoritas untuk mendapatkan manfaat dari kemajuan teknologi finansial dengan mendorong inovasi namun tetap dapat menjaga kestabilan dan integrasi sistem keuangan serta perlindungan konsumen. Secara garis besar, *Bali Fintech Agenda* tersebut merefleksikan pengalaman negara-negara anggota IMF dan World Bank

dalam menyikapi perkembangan *fintech*.

**Perkembangan *fintech* secara global dan regional, serta peluang dan tantangan industri *fintech* di kawasan turut menjadi topik diskusi yang mengemuka di fora pertemuan regional.**

Pada pertemuan forum kerja sama bank sentral di kawasan Asia Pasifik (EMEAP), GBI menyampaikan urgensi perumusan regulasi dan supervisi *fintech*, termasuk regulasi terhadap layanan *fintech* yang berdimensi lintas batas dan lintas yuridiksi. Perumusan tersebut dimaksudkan agar *fintech* tidak menyebabkan *shadow banking* yang merupakan sumber risiko bagi stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.

#### **E. Kerja Sama Integrasi Sektor Keuangan**

**ASEAN terus melanjutkan kerja sama untuk mendorong integrasi keuangan maupun nonkeuangan untuk mencapai visi ASEAN Economic Community (AEC) 2025 yaitu mencapai masyarakat ekonomi yang terintegrasi dan kohesif, kompetitif, inovatif, dinamis, serta inklusif.** Pada pertemuan ASEAN SLC TW3-18, negara anggota melakukan evaluasi kemajuan implementasi *Strategic Action Plan (SAP)* dan *Key Performance Indicators (KPIs)* yang telah disepakati. Secara umum pencapaian SAP di setiap *Working Committee* masih pada jalur yang diharapkan dan perhitungan KPI secara reguler terus dilakukan untuk memantau perkembangan

proses integrasi keuangan di ASEAN.

**Pada pertemuan ASEAN SLC, Co-chairs Working Committee menyampaikan laporan perkembangan proses integrasi di masing-masing WC.** Secara khusus, WC-FINC (*Working Committee on Financial Inclusion*) menyampaikan laporan finalisasi *Guidance Notes on Digital Financial Services* dan *Guidance Notes on Financial Education and Consumer Protection*. *Guidance Notes* tersebut diharapkan dapat mendorong upaya peningkatan inklusi keuangan di kawasan. Selain itu, WC-FSL (*Working Committee on Financial Services Liberalization*) melaporkan penyusunan *ASEAN Trade in Services Agreement (ATISA)* sebagai bentuk kerja sama untuk mendorong integrasi keuangan di kawasan untuk mencapai visi ASEAN. ATISA diharapkan dapat selesai dan disepakati pada awal 2019. Pada pertemuan ASEAN SLC, anggota juga menyetujui usulan pembentukan dua *Sub-Working Group (SWG)* pada WC-CMD (*Working Committee on Capital Market Development*) yaitu (i) *SWG on Green Finance*; dan (ii) *SWG on Infrastructure Financing*. Usulan ini merupakan hasil pertemuan WC-CMD pada 4 Oktober 2018 di Hanoi. Terkait usulan pembentukan dua SWG tersebut, Bank Indonesia mengingatkan kemungkinan terdapat isu lintas sektoral dengan pembahasan pada fora internasional lain sehingga SWG diharapkan memiliki tujuan yang jelas agar dapat memberikan nilai tambah bagi kemajuan inisiatif pendalaman pasar dan pembiayaan infrastruktur di kawasan.

## F. Kerja Sama Peningkatan Kapasitas (Capacity Building).

**Pertemuan South East Asian Central Banks (SEACEN) menyampaikan hasil dari dua kajian mengenai kondisi utang rumah tangga dan efektivitas kebijakan makroprudensial di negara anggota.** Kajian pertama berjudul "*Household Debt in SEACEN Economies*" mengkaji kondisi utang rumah tangga (*household debt*) yang terus meningkat sangat tinggi di banyak anggota SEACEN dan menjadi tantangan bagi otoritas moneter, makroprudensial, maupun fiskal. Sementara

itu, kajian kedua berjudul "*Macroprudential Policies in SEACEN Economies*" mengkaji efektivitas kebijakan makroprudensial dalam mengendalikan pertumbuhan kredit. Dalam kedua kajian tersebut terlihat bahwa kebijakan makroprudensial yang terkait dengan kredit secara efektif meredam ekspansi kredit, sementara instrumen kebijakan makroprudensial yang terkait likuiditas dapat memoderasi pertumbuhan *leverage*. Kajian SEACEN tersebut dapat diakses melalui tautan <https://www.seacen.org/publication-research.php>.

## BOKS

### PERTEMUAN TAHUNAN IMF-WORLD BANK 2018 *SHOWCASING INDONESIA'S ECONOMIC ACHIEVEMENTS*

#### *The World is Coming to Indonesia*

**Penyelenggaraan *Annual Meeting International Monetary Fund-World Bank 2018 (IMF-WB AM2018)* yang berlangsung di Nusa Dua, Bali menjadi momen bersejarah bagi bangsa Indonesia.<sup>2</sup>**

Rangkaian pertemuan tahunan yang diselenggarakan pada 8–14 Oktober 2018 di Kawasan Nusa Dua Bali tersebut dihadiri oleh 186<sup>3</sup> negara dan sekitar 33.000 peserta<sup>4</sup>, rekor tertinggi sepanjang sejarah penyelenggaraan *Annual Meeting* di luar Washington D.C. Komitmen yang kuat dari

2 Indonesia merupakan negara ke-4 di ASEAN, setelah Filipina, Thailand, dan Singapura, yang pernah menjadi tuan rumah pertemuan tahunan IMF-World Bank.

3 Tiga dari 189 negara anggota tidak hadir, yaitu Sao Tome and Principe, Suriah, dan Barbados.

4 Terdiri dari peserta luar dan dalam negeri.

Pemerintah Indonesia untuk tetap menyelenggarakan IMF-WB AM2018 pasca-bencana alam di Lombok dan Palu, serta kesuksesan penyelenggaraan acara mendapat apresiasi dari kedua organisasi internasional dan seluruh anggota delegasi.

**Berbeda dari penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya, IMF-WB AM2018 kali ini menjadi lebih istimewa dengan kehadiran para pemimpin negara ASEAN.**

Pelaksanaan ASEAN *Leaders Gathering* di sela rangkaian kegiatan IMF-WB AM2018 menunjukkan bahwa Indonesia memiliki pengaruh yang cukup besar di kawasan. ASEAN *Leaders Gathering* juga memberi pesan kuat tentang eratnya kerja sama dan kolaborasi di kawasan Asia, di tengah surutnya semangat kerja sama multilateral. Pertemuan pemimpin negara itu menghasilkan kesepakatan untuk meningkatkan *policy dialogue*, merumuskan secara lebih tajam kerja sama keuangan, dan menjajaki simulasi fasilitas *Chiang Mai Initiative Multilateralization* (CMIM).

**IMF-WB AM2018 diselenggarakan di tengah tantangan perekonomian global yang tinggi dan diliputi ketidakpastian.** Eks-

pansi pertumbuhan ekonomi masih berlangsung tetapi tidak merata, sementara risiko dari peningkatan ketegangan perdagangan dan faktor geopolitik terealisasi. Menjawab tantangan tersebut, *International Monetary and Financial Committee* (IMFC) merekomendasikan agar kebijakan fiskal diarahkan untuk membangun bantalan atau *buffers*, bersifat fleksibel dan menunjang pertumbuhan, menghindari prosiklikalitas, meningkatkan kualitas infrastruktur dan keterampilan pekerja, serta menjaga sustainabilitas utang. Sementara, bank sentral disarankan mencermati risiko terhadap stabilitas sistem keuangan, mempertahankan kebijakan moneter akomodatif, mengomunikasikan kebijakan, dan implementasi kebijakan atas dasar *data dependent*.

**Menghadapi tantangan di perekonomian global, Indonesia sebagai tuan rumah menekankan pentingnya memperkuat kerja sama dan koordinasi kebijakan internasional untuk mengatasi ketidakpastian dan tantangan global.** Indonesia juga menggarisbawahi pentingnya komunikasi kebijakan yang lebih baik dari negara maju terkait normalisasi kebijakan moneter yang ditempuh serta memodernisasi *rules based multilateral trading*

*system*. Dalam menanggapi isu ketegangan perdagangan, Bank Indonesia secara khusus menyuarakan pentingnya perdagangan antar negara yang dilakukan secara *free, fair, and mutually beneficial*.

### **The Bali Initiatives**

**Pada rangkaian IMF-WB AM2018, Pemerintah Indonesia mengusung agenda pembahasan yang disebut *the Bali Initiatives*.**

Inisiatif tersebut meliputi beberapa hal, yaitu (i) *capital package*, (ii) *study on urbanisation*, (iii) *human capital index (HCI)*, dan (iv) *Bali Fintech Agenda*. Isu *capital package* ditujukan untuk memperkuat modalitas dua lembaga di bawah WB yakni *International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)* dan *International Finance Corporation (IFC)* guna meningkatkan peran WB dalam mengentaskan kemiskinan dan memperbaiki kesejahteraan sosial. Dalam IMF-WB AM2018, WB mengesahkan kenaikan modal sebesar USD7,5 miliar (IBRD) dan USD5,5 miliar (IFC). Selanjutnya, dalam konteks *study on urbanisation*, WB melakukan kajian untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan terkait pengelolaan urbanisasi agar dapat memberi manfaat optimal

bagi pertumbuhan ekonomi. WB juga bekerja sama dengan sejumlah otoritas di Indonesia untuk melakukan kajian mengenai urbanisasi di Indonesia.

**Dalam IMF-WB AM2018, WB juga meluncurkan HCI yang dapat menjadi referensi dalam menetapkan kebijakan investasi di bidang pendidikan dan kesehatan.**

Dalam HCI World Bank, Indonesia menduduki peringkat 87 dari 157 negara dengan nilai 0,53 (skala 1). Indonesia memiliki nilai lebih baik dari kelompok pendapatan rendah menengah (*lower-middle income countries*), namun masih memiliki tantangan dalam menangani isu *stunting*.<sup>5</sup> Indonesia juga merupakan salah satu *early adaptor country* dari 58 negara yang terlibat dan bertindak sebagai *Chairman* dari *Community of Practise*. Sebagai *chairman*, Indonesia akan memimpin pembahasan program-program investasi sumber daya manusia selama satu tahun ke depan bersama dengan WB.

**Dalam rangka mengoptimalkan peluang teknologi untuk pertumbuhan inklusif, Indonesia bersama dengan IMF dan**

<sup>5</sup> *Stunting* adalah gagal tumbuh akibat kurang gizi kronis.

**WB juga menerbitkan *Bali Fintech Agenda*.** *Bali Fintech Agenda* terdiri atas 12 prinsip,<sup>6</sup> yang dirumuskan untuk mereduksi hambatan yang mengemuka dari ketimpangan akses keuangan dan mendapatkan manfaat yang optimal dari perkembangan *fintech*. Prinsip tersebut dibangun berdasarkan perbedaan karakteristik negara dalam pemanfaatan *fintech*. Untuk itu, Indonesia menyambut baik peluncuran *Bali Fintech Agenda*. Prinsip-prinsip dalam agenda tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan teknologi guna mencapai pertumbuhan yang inklusif.

6 Prinsip *Bali Fintech Agenda*: (i) *Embrace the fintech revolution*; (ii) *Enable new technologies to enhance financial service provision*; (iii) *Reinforce competition and commitment to open, free and contestable market*; (iv) *Foster fintech to promote financial inclusion and develop financial markets*; (v) *Monitor developments closely to deepen understanding of evolving financial systems*; (vi) *Adapt regulatory framework and supervisory practices for orderly development and stability of the financial system*; (vii) *Safeguard financial integrity*; (viii) *Modernize legal frameworks to provide an enabling legal landscape*; (ix) *Ensure the stability of monetary and financial system*; (x) *Develop robust financial and data infrastructure to sustain fintech benefits*; (xi) *Encourage international coordination and cooperation, and information sharing*; (xii) *Enhance collective surveillance and assessment of financial sector risks*

### Peran Aktif Bank Indonesia

**Bank Indonesia secara aktif mengikuti pertemuan utama yang berlangsung pada rangkaian IMF-WB AM2018, serta berperan dalam sejumlah pertemuan lainnya.** Bank Indonesia menyelenggarakan 28 *side and parallel events*, 36 *bilateral meetings*, serta menyepakati kerja sama keuangan dan peningkatan kapasitas dengan bank sentral lain. Di dalam rangkaian pertemuan tersebut, Bank Indonesia memperjuangkan empat tema prioritas di bidang keuangan, yaitu (i) penguatan *International Monetary System (IMS)*; (ii) pembiayaan infrastruktur; (iii) ekonomi digital; dan (iv) ekonomi dan keuangan syariah.

**Penguatan IMS diperlukan untuk meningkatkan resiliensi global di tengah kondisi perekonomian yang tidak menentu dan diliputi ketidakpastian.** Dalam kaitan ini, Bank Indonesia mendorong penguatan *Global Financial Safety Net (GFSN)* yang berbasis kuota dan sumber daya IMF yang kuat, dengan IMF sebagai pusatnya. Selain itu, Indonesia juga mendorong kolaborasi kerja sama keuangan regional (*regional financing arrangement/RFA*) dengan GFSN melalui peningkatan sinergi modalitas dan pertukaran informasi IMF-RFA sesuai mandat masing-masing.

**Terkait infrastruktur, IMF-WB AM2018 menyoroti pentingnya peningkatan peran serta swasta dalam menutup kesenjangan pembiayaan infrastruktur.** Pada pertemuan G20, Indonesia menyatakan dukungan pada upaya penyediaan pembiayaan infrastruktur, melalui implementasi *Roadmap to Infrastructure as an Asset Class* dan beberapa pedoman pelaksanaannya. Dengan pedoman tersebut diharapkan dapat dihasilkan proyek-proyek yang *bankable* sehingga dapat menjadi solusi untuk menutup kesenjangan pembiayaan infrastruktur. Penyelenggaraan IMF-WB AM2018 juga dimanfaatkan oleh Indonesia untuk mengumpulkan investor dan berhasil mendapatkan pendanaan untuk membiayai 19 proyek infrastruktur milik sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar USD13,5 miliar atau sekitar Rp200 triliun dari perbankan lokal dan investor global.

**Perkembangan ekonomi digital yang pesat dapat memberikan manfaat, namun juga memiliki sejumlah risiko terhadap perekonomian dunia.** Untuk itu, dalam beberapa pertemuan atau seminar yang membahas mengenai ekonomi digital, BI aktif menyuarakan pentingnya kesiapan infrastruktur

serta ketersediaan pengaturan, sumber daya dan kapasitas yang memadai dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan digital sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi perekonomian dan memitigasi risikonya.

**Terkait ekonomi dan keuangan syariah, pembahasan difokuskan pada peran penting ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung agenda Sustainable Development Goals (SDGs).** Bank Indonesia bersama *Islamic Development Bank* (IDB) meluncurkan *Waqf Core Principles* dan *Cash Waqf-Linked Sukuk* sebagai standar peraturan global. Penerapan prinsip tersebut akan bermanfaat dalam mewujudkan praktik keuangan syariah global yang sehat sehingga menumbuhkan kepercayaan publik.

### **Kerja Sama Keuangan dan Membangun Persepsi Positif**

**Dalam rangkaian IMF-WB AM2018, Bank Indonesia menyepakati kerja sama keuangan dengan sejumlah bank sentral.** Dalam pertemuan pemimpin negara secara bilateral di sela-sela IMF-WB AM2018, Presiden RI dan Perdana

Menteri Singapura sepakat memperkuat kerja sama keuangan untuk mendukung stabilitas moneter dan keuangan, serta pembangunan ekonomi kedua negara. Kerja sama tersebut diwujudkan dalam bentuk *bilateral swap and repo arrangements* (BSA) antara Bank Indonesia dan Monetary Authority of Singapore (MAS) senilai *eq.* USD10 miliar. Selain itu, Bank Indonesia dan People's Bank of China (PBC) juga menyepakati penguatan kerja sama *Bilateral Currency Swap Arrangement* dengan peningkatan nilai dari semula CNY100 miliar (USD15 miliar) menjadi CNY200 miliar (USD30 miliar). Penguatan kerja sama juga berhasil diraih antara Bank Indonesia dan Bank of Japan (BI-BOJ). Amendemen *Bilateral Swap Arrangement* BI-BOJ kini memungkinkan Indonesia melakukan *swap* rupiah dengan dolar AS dan/atau yen Jepang, dari sebelumnya hanya dolar AS senilai USD22,76 miliar.

**Selain kerja sama di bidang keuangan, juga dilakukan penguatan kerja sama peningkatan kapasitas (*capacity building*).** Bank of England, the Federal Reserves of New York, dan Swiss National Bank menawarkan peningkatan kapasitas kepada BI di area *financial market infrastructure* dan *digital economy*. Di

sisinya lain, BI memberikan penawaran peningkatan kapasitas kepada Otoritas Moneter Palestina di bidang sistem pembayaran dan Bank Sentral Suriname di bidang *Islamic Economy and Finance*.

**Bank Indonesia juga melaksanakan pertemuan dengan investor dan *rating agencies* dalam rangka mengelola persepsi positif perekonomian domestik.**

Bank Indonesia menjelaskan kinerja dan *outlook* perekonomian nasional yang cukup kuat, di tengah berbagai tantangan risiko perekonomian global. Penyelenggaraan IMF-WB AM2018 juga memberikan persepsi positif tersendiri selain aspek ekonomi. Sarana infrastruktur yang memadai dan respons cepat pemerintah serta masyarakat dalam penanganan bencana, sembari tetap melaksanakan perhelatan besar mendapat apresiasi dari dunia internasional. Penyelenggaraan IMF-WB AM2018 telah membuka mata dunia dan mengubah cara pandang pengambil kebijakan ekonomi dalam melihat Indonesia. Dengan keberhasilan penyelenggaraan IMF-WB AM2018, upaya *Showcasing Indonesia's Economic Achievements* diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi kemajuan bangsa.

Sebagai penutup, perhelatan akbar Pertemuan Tahunan IMF-WB 2018 di Bali telah mengharumkan nama Indonesia. Pertemuan tersebut juga memberikan manfaat signifikan

bagi pembangunan ekonomi dan kemaslahatan rakyat Indonesia, serta berkontribusi nyata pada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi global.